

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi untuk mengelola lingkungan hidup (Purba *et al.*, 2020). Indonesia sebagai negara agraris memiliki sektor pertanian yang penting bagi pembangunan nasional. Rata-rata distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2019-2022 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menduduki peringkat kedua setelah Sektor Industri Pengolahan dengan nilai 13,02% (Kementerian Pertanian, 2023a). Pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperbarui kebijakan pertanian.

Salah satu kebijakan pertanian pemerintah adalah pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah pusat sejak tahun 1970-an (Lestari *et al.*, 2022). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian. Perumusannya diarahkan untuk mengurangi beban pembiayaan petani dalam penyediaan pupuk sebagai *input* produksi usahatani (Ragimun *et al.*, 2020). Syarat penerima pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, yaitu diperuntukkan bagi petani yang bekerja pada salah satu dari sub-sektor berikut:

- 1) Tanaman pangan: komoditas padi, jagung, kedelai
- 2) Hortikultura: komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, dan/atau

3) Perkebunan: komoditas kopi, tebu rakyat, kakao

Petani tidak boleh memiliki lebih dari 2 ha lahan dan diutamakan untuk petani kecil dengan luas lahan maksimal dari 0,5 ha. Syarat ini diberikan karena pendapatan petani kecil lebih rendah, sehingga dianggap lebih membutuhkan dari segi pembiayaan (Prarikeslan *et al.*, 2023).

Penggunaan pupuk dalam usahatani sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pupuk merupakan salah satu faktor produksi utama selain lahan, tenaga kerja, dan modal dalam usahatani yang menyediakan unsur hara tanaman (Mansyur *et al.*, 2021). Namun, biaya yang dikeluarkan petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk dinilai cukup tinggi. Biaya pupuk sendiri merupakan biaya terbesar setelah sewa lahan dan bibit yang mencapai 14,88% dari total seluruh biaya usahatani yang dikeluarkan petani (Nugraha *et al.*, 2023). Hal inilah yang mendorong dikeluarkannya kebijakan pupuk bersubsidi. Kebijakan ini mampu membantu mengurangi biaya hingga 14,1% per hektar dari total biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani (Sari *et al.*, 2018).

Pemerintah telah memodifikasi kebijakan pupuk bersubsidi dengan menerbitkan program Kartu Tani. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi dan mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi. Kartu tani dirancang untuk mewujudkan asas enam tepat penyaluran pupuk bersubsidi, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga (Nugroho *et al.*, 2018). Namun, pada pelaksanaannya terdapat faktor penghambat, seperti penggunaan pupuk oleh petani yang melebihi anjuran pemupukan, pedagang pupuk yang jauh dari lokasi petani, kendala ketersediaan jenis pupuk yang dibutuhkan, banyaknya

petani yang belum mengetahui dan memahami penggunaan kartu tani, serta kurangnya sosialisasi dan promosi program yang efektif kepada petani oleh pemerintah (Mukson *et al.*, 2024).

Pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani berperan penting bagi perekonomian negara, sehingga perlu dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya. Salah satu caranya adalah dengan menilai kepuasan petani. Pengukuran kepuasan petani ini dapat menangkap pengalaman langsung petani sebagai pengguna akhir pupuk bersubsidi. Kepuasan dapat didefinisikan sebagai perasaan yang muncul dalam diri konsumen setelah membandingkan kinerja suatu produk dengan ekspektasi kinerjanya (Winowatan *et al.*, 2021).

Penelitian berlokasi di Kabupaten Kendal yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Total penerima kartu tani di Kabupaten Kendal mencapai 82,26% dari total keseluruhan 62.000 petani yang menerima subsidi pupuk pada tahun 2018 (Chakim *et al.*, 2019). Meskipun jumlah penerima kartu tani tinggi, implementasi penggunaan kartu tani di Kabupaten Kendal masih cukup rendah. Implementasi tersebut hanya sebesar 23,5% akibat tingkat ekonomi dan tingkat pemahaman petani terhadap penggunaan kartu tani (Chakim *et al.*, 2019). Permasalahan lain yang muncul adalah adanya perbedaan HET di tingkat pemerintah dan petani. Perbedaan tersebut sebesar Rp40.000/kwintal (Kurniandini *et al.*, 2022). Hal ini diduga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan petani terhadap pupuk bersubsidi.

Kecamatan Gemuh merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kendal yang banyak menggunakan pupuk bersubsidi. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Provinsi Jawa Tengah mencatat kecamatan ini melakukan transaksi pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani terbanyak di Provinsi Jawa Tengah pada periode 1 Januari – 30 April 2022 dengan total 20.547 dengan rata-rata petani melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi sebanyak 3,3 kali dalam kurun waktu tersebut (Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa petani kecamatan Gemuh sering melakukan transaksi pupuk bersubsidi, sehingga dapat dikatakan petani lebih familier dengan proses transaksi dan penggunaan pupuk bersubsidi. Frekuensi transaksi ini juga dapat dipengaruhi oleh kepuasan konsumen (Octabriyantiningtyas *et al.*, 2019).

Adanya keterkaitan antara berbagai fenomena pada implementasi kebijakan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan petani menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kepuasan Petani terhadap Pupuk Bersubsidi pada Transaksi Menggunakan Kartu Tani di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal”. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas pupuk bersubsidi dengan evaluasi pada implementasi asas enam tepat, tingkat kepuasan petani terhadap pupuk bersubsidi, serta berbagai faktor sosial ekonomi yang mungkin dapat mempengaruhi kepuasan petani terhadap pupuk bersubsidi pada transaksi menggunakan kartu tani di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai kinerja penyaluran pupuk dan kualitas pupuk bersubsidi yang diterima oleh petani, serta sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan yang akan datang.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian diantaranya:

1. Menilai efektivitas penggunaan pupuk bersubsidi pada transaksi menggunakan kartu tani di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.
2. Mengukur tingkat kepuasan petani di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal terhadap kebijakan pupuk bersubsidi pada transaksi menggunakan kartu tani.
3. Menganalisis pengaruh atribut dan faktor sosial ekonomi terhadap tingkat kepuasan petani pada pupuk bersubsidi di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian diantaranya:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan.
2. Bagi petani, hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi mengenai tingkat kepuasan petani terhadap bantuan pupuk bersubsidi.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber referensi, informasi, keterangan, dan acuan untuk penelitian selanjutnya.
4. Bagi pemerintah, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan petani, secara khusus dalam pengembangan kebijakan pupuk bersubsidi dan penyelenggaraan program kartu tani.